

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan ikhtisar akuntabilitas yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selama tahun 2020, atas pelaksanaan anggaran program dan kegiatan sesuai yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

Tidak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu atau terlibat dalam penyusunan LKjIP Tahun 2020 ini. Harapan kami semoga dokumen LKjIP Tahun 2020 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Dan LKjIP Tahun 2020 ini juga dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada tahun yang akan datang. Amin

Luwuk, 15 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai



HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom

19620912 199603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing governance*) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2020 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata, maka Dinas Kominfo telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan kebijakan yang tepat dan terarah melalui program dan kegiatan.

Tujuan strategis Dinas Kominfo adalah Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency dengan sasaran strategis Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika dengan indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika.

Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2020 Dinas Kominfo telah merencanakan akan melaksanakan 13 program dan 47 kegiatan yang didukung dengan alokasi APBD Kabupaten Banggai sebesar **Rp.3.456.179.347,76** atau **38,27%** dari total anggaran Dinas Kominfo sebesar **Rp.7.839.491.664**. Namun, adanya penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan (*refocusing*) yang harus difokuskan pada penggunaan alokasi anggaran kegiatan dalam rangkaantisipasi dan penanganan dampak penyebaran Covid-19 (sesuai Permendagri 20 Tahun 2020 dan PMK 35/PMK.07/2020) menyebabkan terjadinya perubahan komposisi anggaran program dan kegiatan pada DPA Dinas Kominfo.

Setelah mengalami *refocusing* dan momen perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Dinas Kominfo hanya melaksanakan 9 program dan 28 kegiatan yang didukung dengan alokasi APBD sebesar **Rp.1.659.995.552** atau **24,15%** dari total anggaran Dinas Kominfo sebesar **Rp.6.874.615.552**.

Berdasarkan hasil analisa atas pencapaian sasaran kinerja utama Dinas Kominfo Kabupaten Banggai pada tahun 2020, **nilai IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika** adalah **3,05** atau **76,24**. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kominfo termasuk **kategori B** sehingga kinerja pelayanan Dinas Kominfo untuk tahun 2020 dapat dikatakan **Baik**.

Jika dibandingkan pada tahun 2019 capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Banggai mengalami peningkatan sebesar 0,58 dimana pada tahun 2019 capaian IKU sebesar 75,66. Nilai konversi IKM tahun 2020 ini belum sesuai target IKU Dinas Kominfo Tahun 2020 sebagaimana ditargetkan 84,57. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Dinas Kominfo di tahun mendatang.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran Belanja Langsung atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo pada tahun 2020 sebesar **Rp.1.623.575.783** atau sebesar **97,81%**. Persentase realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 ini meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan serapan anggaran Belanja Langsung pada tahun tahun 2019 yang hanya sebesar 84,56% dan tahun 2018 sebesar 94,43%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Landasan Hukum	9
1.4. Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	26
4.1. Simpulan Umum	26
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	27
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Per 31 Desember 2020).....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.....	13
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Tahun 2020..	14
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020.....	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020.....	17
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo sesuai Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2017-2021.....	18
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 .	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai...	4
----------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kerjanya.

SAKIP dikembangkan secara integrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntabilitas pemerintahan. Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan kinerja ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan ikhtisar pertanggungjawaban yang memuat secara lengkap tentang pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020. LKjIP ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, selanjutnya disingkat Dinas Kominfo merupakan perangkat daerah di Kabupaten Banggai yang tergolong masih sangat muda karena baru terbentuk pada Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Kominfo merupakan perangkat daerah yang terbentuk hasil penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan serumpun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yakni urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika (yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan), urusan statistik (sebelumnya kewenangan dari Bappeda) dan urusan persandian (sebelumnya kewenangan dari Bagian Humas Setda).

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, Dinas Kominfo merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara kewenangan/ melaksanakan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan (dari Pemerintah Pusat).

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kominfo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-Government, bidang hubungan media dan sumber daya komunikasi publik (SDKP), bidang persandian dan bidang statistik.
2. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur Dasar Data Center dan e-Government, bidang Hubungan Media dan SDKP, bidang Persandian dan Bidang Statistik.
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang Layanan Infrastruktur Dasar Data Center dan e-Government, Bidang Hubungan Media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
4. Pengumpulan, pengolahan data dan Informasi serta evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, Bidang Layanan Infrastruktur Dasar Data Center dan e-Government, Bidang Hubungan Media dan SDKP, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar Data Center dan e-Government, bidang hubungan media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
6. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Kominfo terdiri atas :

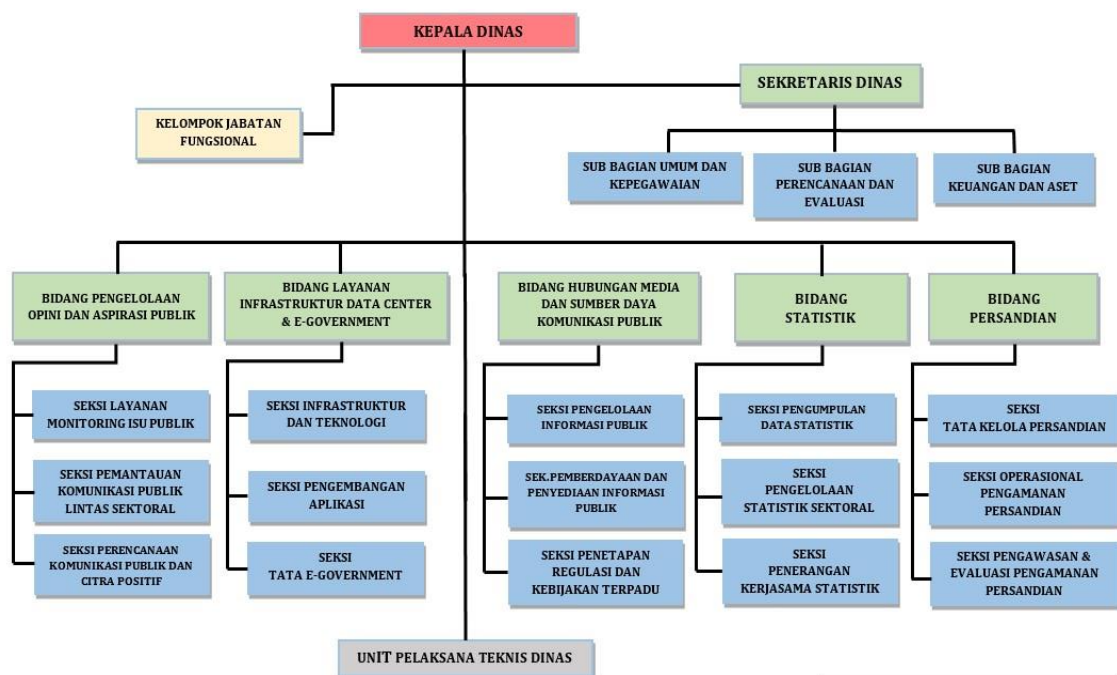
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas, yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, yang meliputi Seksi Layanan Monitoring dan Isu Publik; Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral; dan Seksi Perencanaan Komunikasi dan Citra Positif.
4. Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government yang meliputi Seksi Infrastruktur dan Teknologi; Seksi Pengembangan Aplikasi; dan Seksi Tata e-Government.

5. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik, yang meliputi : Seksi Pengelolaan Informasi Publik; Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik; dan Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu.
6. Bidang Statistik, yang meliputi Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral; Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral; dan Seksi Penerangan Kerjasama Statistik.
7. Bidang Persandian, yang meliputi Seksi Tata Kelola Persandian; Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian Struktur Organisasi Dinas Kominfo dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI



Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo didukung oleh 45 (empat puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Honorer. Jumlah ASN Dinas Kominfo yang terinci berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
(Per 31 Desember 2020)

No	Klasifikasi Berdasarkan	Jumlah (Org)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Status Pegawai			
	- PNS	45	100,00	
	- CPNS	-	0,00	
2.	Jenis Kelamin			
	- Laki-laki	29	64,44	
	- Perempuan	16	35,56	
3.	Tingkat Pendidikan			
	- SMP / sederajat	-	0,00	
	- SMA / sederajat	5	11,11	
	- D1 / D2 / D3	2	4,44	
	- S1	34	75,56	
	- S2	5	8,89	
4.	Golongan			
	- Golongan IV	5	11,11	
	- Golongan III	33	73,33	
	- Golongan II	7	15,56	
	- Golongan I	-	0,00	
5.	Agama			
	- Islam	35	77,78	
	- Kristen	9	20,00	
	- Hindu	1	2,22	
	- Buddha	-	0,00	
	- Katholik	-	0,00	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kab.Banggai

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Kominfo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Banggai. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo yakni berikut :

1. Pengembangan layanan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat, aman dan tepat. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi;
 - Peningkatan kapasitas aksesibilitas (bandwidth);
 - Pengintegrasian aplikasi informatika;
 - Penyediaan server basis data dan aplikasi;
 - Penyediaan dan pengembangan aplikasi layanan publik baik yang berbasis web maupun mobile; dan
 - Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika.
2. Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi publik yang profesional
3. Penyediaan data statistik sektoral sekaligus menjamin tingkat keakuratan data sektoral. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Peningkatan diseminasi data statistik sektoral yang termutakhirkan
4. Penguatan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Penyusunan peraturan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup tentang kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi pelaksana urusan persandian
5. Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi keamanan informasi dan sarana untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah

Sesuai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Kominfo antara lain :

1. Masih adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi.

Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya *blank spot* di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Balantak Utara dan pesisir Kecamatan Bunta. Kendala serius yang juga dihadapi pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan TIK, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan

2. Kebutuhan akses internet untuk Puskesmas, SMK/SMU dan Desa

Berdasarkan data statistik dari Buku Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2020, Kabupaten Banggai memiliki 291 Desa, 26 Puskesmas Induk, 22 SMU, dan 12 SMK. Dari jumlah tersebut sebanyak 80% Puskesmas Induk, 19 SMU, 9 SMK dan kurang lebih 60% desa di Kabupaten Banggai memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Desa membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik bercocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi.

Selain itu, dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

3. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Perangkat Daerah

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional. Selain itu, terbatasnya SDM bidang TIK dan keterbatasan anggaran menyebabkan kurang optimalnya penerapan, pelayanan dan pengelolaan e-government perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Secara eksternal, hal ini dipengaruhi juga oleh belum optimalnya pemuktahiran (*update*) database dari perangkat daerah dan belum optimalnya sosialisasi penerapan aplikasi informatika pada perangkat daerah.

4. Layanan Pengurusan Rekomendasi / Izin dan Administrasi Teknis

Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi dan teknis lembaga penyiaran lokal, Papan Reklame (*Billboard*), Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) dan Penggelaran Kabel Serat Optik (FO) banyak disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya masih ada masyarakat pemohon belum mengetahui bahwa proses perizinan harus melalui Dinas Kominfo sehingga kadangkala mengabaikan persyaratan rekomendasi teknis dari Dinas Kominfo.

5. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Belum termanfaatkannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosis menjadi KIM. Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampainya informasi kepada masyarakat. Selain KIM saat ini juga terdapat telecenter yang menjadi wadah bagi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi baik secara vertikal maupun horizontal.

6. Maraknya Hoaks, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware

Maraknya konten hoaks, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, *malware* dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banggai harus hadir dalam upaya penanganan konten ilegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional.

7. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

8. Diseminasi Data Statistik Sektorial yang belum optimal

Pada prinsipnya belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektorial oleh Dinas Kominfo dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur di bidang statistik, belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektorial dengan perangkat-perangkat daerah yang terkait dan belum adanya regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan survei data maupun kompilasi produk administrasi data statistik sektorial di Kabupaten Banggai.

9. Sarana dan Prasarana Aparatur

Masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas seperti belum tersedianya ruang server, Media Center, ruang rapat dan ruang kerja pegawai yang representatif dan memadai.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN, yang menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum Dinas Kominfo, strategi dan arah kebijakan, isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Kominfo, dasar hukum penyusunan LKjIP serta sistematika penulisan LKjIP, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang menguraikan tentang ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang memaparkan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kominfo pada tahun 2020.
- BAB IV PENUTUP, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kominfo, rencana tindak lanjut dan komitmen yang akan dilakukan Dinas Kominfo untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang..

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses pegawai dan atasan langsungnya secara bersama-sama menyiapkan dan menyepakati pekerjaan yang harus dilakukan pada satu tahun tertentu, menentukan sasaran kinerja dan target yang harus diukur melalui indikator kinerja, serta mengidentifikasi dan merencanakan cara mengatasi kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2020.

Rencana Strategis Dinas Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo yang berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021 telah ditetapkan Visi dan beberapa Misi utama dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih, seperti mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama serta peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata.

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa;
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
5. Mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Dari 6 misi tersebut, fokus Dinas Kominfo terdapat pada misi keempat, yaitu “Mewujudkan penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata”. Selain fokus pada misi keempat, Dinas Kominfo juga akan tetap mendukung misi pertama pemerintah yaitu “Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa”. Misi tersebut akan dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kominfo melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama lima tahun ke depan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut, maka salah satu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sangat berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu penyediaan dan peningkatan infrastruktur melalui pengembangan teknologi informasi, dengan sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas publik terhadap layanan informasi dan komunikasi, meningkatnya keterbukaan informasi publik, dan meningkatnya keamanan data dan informasi pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa bidang komunikasi dan informatika dalam tatanan pembangunan daerah Kabupaten Banggai memegang peranan yang sangat strategis, karena selain bertujuan untuk menyediakan informasi bagi seluruh penduduk, juga memberi kontribusi yang besar dalam perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Banggai.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka upaya-upaya akan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai yakni dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik melalui pemanfaatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengaplikasikan dan mengintegrasikan sistem pelayanan administrasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), mengoptimalisasi pemanfaatan TIK untuk layanan informasi publik, memfasilitasi ketersediaan *smart area* berupa pemasangan wifi gratis di beberapa ruang publik dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang masih *blankspot*.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, Dinas Kominfo telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA			
MISI : MEWUJUDKAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Pengembangan layanan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat, aman dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi - Peningkatan kapasitas aksesibilitas (bandwidth) - Pengintegrasian aplikasi informatika - Penyediaan server basis data dan aplikasi - Penyediaan dan pengembangan aplikasi layanan publik baik yang berbasis web maupun mobile - Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika
		Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi publik yang profesional
		Penyediaan data statistik sektoral sekaligus menjamin tingkat keakuratan data sektoral	Peningkatan diseminasi data statistik sektoral yang termuktahirkan
		Penguatan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peraturan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup tentang kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten - Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi pelaksana urusan persandian
		Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi	Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi keamanan informasi dan sarana untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka Dinas Kominfo menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) maupun indikator kinerja kegiatan (*input* dan *output*). Target kinerja ini yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Pada Renja Tahun 2020 telah ditetapkan 14 program dan 59 kegiatan sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Tahun 2020

Kode Prog / Keg	Program / Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.10 . 2.10.01 . 02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.10 . 2.10.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02.10	Pengadaan meubelair
2.10 . 2.10.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.10 . 2.10.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 03.	Program peningkatan disiplin aparat
2.10 . 2.10.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.10 . 2.10.01 . 03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.10 . 2.10.01 . 03.04	Pengadaan pakaian KORPRI
2.10 . 2.10.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.10 . 2.10.01 . 04.	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
2.10 . 2.10.01 . 04.01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2.10 . 2.10.01 . 05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat
2.10 . 2.10.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.10 . 2.10.01 . 05.06	Pembinaan dan pemantauan kerja aparat

2.10 . 2.10.01 . 06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.10 . 2.10.01 . 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.10 . 2.10.01 . 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.10 . 2.10.01 . 06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
2.10 . 2.10.01 . 06.07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
2.10 . 2.10.01 . 06.09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)
2.10 . 2.10.01 . 07.	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
2.10 . 2.10.01 . 07.04	Penyusunan Profil Perangkat Daerah
2.10 . 2.10.01 . 08.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 08.02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.10 . 2.10.01 . 15.01	Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP
2.10 . 2.10.01 . 15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2.10 . 2.10.01 . 15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
2.10 . 2.10.01 . 15.07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
2.10 . 2.10.01 . 15.10	Pengembangan dan Pengelolaan website Daerah
2.10 . 2.10.01 . 15.11	Pembangunan media center
2.10 . 2.10.01 . 15.12	Operasional pelayanan media center
2.10 . 2.10.01 . 15.13	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.10 . 2.10.01 . 17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
2.10 . 2.10.01 . 17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
2.10 . 2.10.01 . 18.	Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media
2.10 . 2.10.01 . 18.02	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.10 . 2.10.01 . 18.03	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
2.10 . 2.10.01 . 18.04	Dukungan Pemanfaatan Informasi Warung Masyarakat (WIM)
2.10 . 2.10.01 . 18.05	Melaksanakan pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial
2.10 . 2.10.01 . 18.07	Mengadakan Sosialisasi Terpadu Tingkat Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 18.10	Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media informasi
2.14 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral
2.14 . 2.10.01 . 15.01	Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral
2.14 . 2.10.01 . 15.02	Pengelolaan dan Analisa Statistik Sektoral
2.14 . 2.10.01 . 15.04	Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi
2.15 . 2.10.01 . 15.01	Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi, sandi telematika dan informasi teknologi lainnya
2.15 . 2.10.01 . 15.02	Penyelenggaraan dan Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan Persandian
2.15 . 2.10.01 . 15.04	Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Persandian
2.15 . 2.10.01 . 16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2.15 . 2.10.01 . 16 .01	Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah
2.15 . 2.10.01 . 16 .02	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
2.15 . 2.10.01 . 16 .03	Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam dokumen LKjIP, capaian kinerja yang diukur adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan IKU. Merujuk pada Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 dan Renja Dinas Kominfo Tahun 2020, maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kominfo pada tahun 2020 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Ket.
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	84,57	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	653.239.000,00	IKU
				Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	57.500.000,00	
				Kerjasama Informasi dengan Media Massa	260.854.500,00	
				Pengembangan Data/ Informasi Statistik sektoral	77.245.000,00	
				Pengelolaan Informasi, Elektronik, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya	136.199.500,00	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	20.000.000,00	
Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis IKU					1.181.338.000,00	
2	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	81	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.384.799.500,00	Non IKU
				Peningkatan Sarana dan Prasarana	283.464.350,00	
				Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	10.000.000,00	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.504.500,00	
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	79.582.000,00	
				Pengembangan Sistem Informasi / Data	8.811.650,00	
				Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	2.500.000,00	
Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis Non IKU					1.818.662.000,00	
Total Pagu Anggaran					3.000.000.000,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian visi misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai capaian kinerja Dinas Kominfo dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kominfo telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2021. Berikut ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	Ket
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	84,57	76,24	Baik	Berdasarkan hasil Survei IKM Tahun 2020
2	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	81 (A)	61,85 (B)	Baik	Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2019. Belum ada LHE 2020

IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo yang digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas pelayanan Dinas Kominfo apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah diisyaratkan oleh pemerintah. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan komunikasi dan informatika didasarkan pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. IKM digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Kominfo.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo diperoleh simpulan bahwa :

1. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2020 adalah sebesar **3,05** atau **76,24**. Hal ini menunjukkan bahwa **mutu pelayanan Dinas Kominfo termasuk kategori B** sehingga kinerja pelayanan Dinas Kominfo untuk tahun 2020 dapat dikatakan **Baik**.
2. IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika tahun 2020 belum sesuai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Tahun 2020 sebagaimana ditargetkan dengan nilai IKM 84,57 (mutu pelayanan A atau kinerja pelayanan Sangat Baik). Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik Dinas Kominfo di tahun 2021.
3. Capaian kinerja tahun 2020 meningkat 0,58 jika dibandingkan nilai IKM layanan kominfo tahun 2019 yang memperoleh nilai 75,66. Walaupun tidak signifikan tetapi Dinas Kominfo senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
4. Nilai akuntabilitas kinerja (AK) Dinas Kominfo yang tercantum dalam tabel 3.1 di atas masih menggunakan nilai AK tahun 2019. Hal ini dikarenakan belum diperolehnya Nilai AK Dinas Kominfo Tahun 2020. Sampai dengan LKJiP ini selesai disusun, Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai belum menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo Tahun 2020.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Dinas Kominfo sampai Tahun 2020 dengan target kinerja sasaran jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Sesuai Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2016-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi / Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	81,00	84,57	86,93	-	-	75,66	76,24	

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas maka dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran Dinas Kominfo sampai dengan Tahun 2020 masih jauh dari apa yang ditargetkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik Dinas Kominfo di tahun 2021. Perlu ada komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan maupun staf pelaksana yang di Dinas Kominfo untuk dapat melakukan perbaikan kinerja secara sistematis dan masif.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi

Dinas Kominfo telah melakukan analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020.

1. Adanya penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan (*refocusing*) yang harus difokuskan pada penggunaan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penyebaran Covid-19 (sesuai amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional). Hal menyebabkan terjadinya perubahan sangat signifikan terhadap komposisi anggaran yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo. Padahal sesuai rencana kerja program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2020, Dinas Kominfo sedianya akan melaksanakan 13 program dan 47 kegiatan. Setelah mengalami *refocusing* dan momen perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Dinas Kominfo hanya melaksanakan 9 program dan 28 kegiatan.
2. Belum terintegrasinya database dan layanan e-government perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya jaringan internet pada beberapa OPD yang terkoneksi ke pusat data (server) Dinas Kominfo dan kurangnya anggaran yang mendukung penyediaan jaringan internet khususnya jaringan *fiber optic* (FO).

3. Dinas Kominfo belum memiliki peralatan penyambung kabel Fiber Optic (*Splicer Toolkit*) dan selama ini harus menyewa kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pengadaan peralatan tersebut.
4. Implementasi e-government/SPBE di Kabupaten Banggai belum dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten dan penuh komitmen. Hal ini menyebabkan Indeks SPBE Kabupaten Banggai masih rendah.
5. Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tupoksi dan Penempatan PNS dalam jabatan tidak sesuai kompetensi dan tidak berdasarkan prinsip *the right man in the right place and the right man in the right job*.
3. Masih terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya blankspot di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Batui Selatan, Luwuk Timur, Masama, Balantak Utara dan pesisir Kecamatan Bunta.
4. Data statistik sektoral yang ada belum memiliki rekomendasi BPS. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kerjasama tertulis (MoU) antara Dinas Kominfo dengan BPS.
5. Belum terintegrasinya penyajian data statistik sektoral kabupaten dengan menggunakan teknologi informasi (masih berupa dokumen). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aplikasi untuk menyajikan data statistik sektoral. Anggaran yang tersedia belum memadai untuk pengadaan aplikasi tersebut.
6. SDM kurang berkompeten di bidang pengelolaan data statistik sektoral. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan di bidang statistik sektoral.
7. Tidak ada SDM sandi dan peralatan persandian yang dibutuhkan mendukung pengamanan data/ informasi pemda. Hal ini disebabkan Petugas Sandiman telah dimutasi/ dipromosi untuk menduduki jabatan eselon IV di Bidang Hubungan Media dan SDKP Dinas Kominfo.

8. Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/informasi pemda tidak jelas. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi pemerintah daerah belum terkoordinasi dengan baik.

Beberapa solusi sebagai upaya alternatif yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur komunikasi dan informatika (jaringan internet) melalui penyediaan jaringan serat optik pada perangkat daerah untuk mengatasi kendala tidak terintegrasinya sistem database aplikasi perangkat daerah ke pusat data (*data center*) Dinas Komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : infrastruktur, aplikasi, kelembagaan dan kebijakan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis Serat Optik (FO) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja seluruh perangkat daerah dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal;
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi melalui penyediaan alat penguat sinyal (*repeater*) pada wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (*blankspot area*). Selain itu, intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.
3. Pemenuhan kebutuhan peralatan penyambung kabel Fiber Optic (*Splicer Toolkit*). Peralatan ini sangat penting untuk perbaikan jaringan TIK pemda.
4. Untuk meningkatkan SDM aparatur yang profesional dan proporsional, Dinas Kominfo akan lebih intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai. Selain itu, Dinas Kominfo akan berupaya mengikutsertakan ASN yang dimiliki untuk mengikuti dalam pelatihan TIK, statistik dan persandian.

5. Peningkatan kerjasama di bidang statistik dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai;
6. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persandian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
7. Dalam pengelolaan keamanan data dan informasi pemerintah daerah, perlu menggunakan metode enkripsi yang dikembangkan sendiri pada semua aplikasi dan peralatan jaringan komputer.
8. Dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik, masyarakat dapat dimudahkan menyampaikan keluhannya melalui aplikasi e-LAPOR sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus langsung didistribusikan kepada perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Kominfo telah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi Penggunaan Sumber daya Dinas Kominfo Tahun 2020 meliputi:

1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kominfo dalam rangka mencapai sasaran kinerja sesuai dengan target Renja Tahun 2020 terlihat dari realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp.1.623.575.783,00 atau 97,81% dari pagu anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.659.995.552,00. Terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,19% (Rp.36.419.769,00).

2. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari Penggunaan sarana TIK untuk penyebarluasan/diseminasi informasi pemerintah daerah melalui Videotron (*Multi Display Information*) untuk saat ini hanya dilakukan saat malam hari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Selain itu, Dinas Kominfo lebih memanfaatkan media online untuk lebih mengefektifkan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dinas Kominfo melakukan pengurangan tenaga honorer sebanyak 3 orang yang dinilai tidak bekerja efektif. Hal ini juga dilakukan untuk lebih mengefektifkan kinerja seluruh pegawai serta optimalisasi pemanfaatan sarana TIK dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Kominfo telah melakukan analisa terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan analisis terhadap program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja selama tahun 2020 antara lain :

1. Pengembangan aplikasi e-absensi guna mendukung peningkatan disiplin ASN se-Kabupaten Banggai. Selain itu, aplikasi ini berguna untuk mempermudah dalam perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP).
2. Fasilitasi pelaksanaan telekonferensi/rapat-rapat pemerintah daerah yang diselenggarakan secara online melalui video conference (vidcon). Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit Corona (Covid-19). Adanya dukungan dari SKPD yang menangani sendiri peralatan jaringan lingkup internal SKPD sehingga pengelola jaringan kabupaten bisa fokus menangani jaringan utama (backbound) antar SKPD, serta dukungan dari SKPD yang berusaha mengamankan sendiri setiap perangkat yang digunakan terutama data dan aplikasi dengan tingkat security level menengah.
3. Pemeliharaan Pusat Data (*Data Center*) dan pengembangan (*upgrade*) server Dinas Kominfo dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi penunjang integrasi aplikasi layanan publik milik pemerintah daerah. Dengan ruang server (pusat data) yang kecil tapi nyaman dan berada dalam gedung yang sama dengan Dinas Kominfo sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan koordinasi.
4. Pelaksanaan koodinasi dan fasilitasi pembuatan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pembentukan LPPL Radio Suara Tompotika (Radio Pemerintah Daerah) dan Penyelenggaraan Kominfo di Kabupaten Banggai.
5. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan.
6. Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah daerah (banggai.go.id) yang bertujuan membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, yang mendukung publikasi melalui media cetak, media sosial dan media online.
7. Diseminasi dan penyebarluasan informasi Program Pencegahan Stunting.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2020, realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo pada Tahun Anggaran 2020 adalah **Rp.1.623.575.783** atau sebesar **97,81%**. Persentase realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 ini meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan serapan anggaran Belanja Langsung pada tahun tahun 2019 yang hanya sebesar 84,56% dan tahun 2018 sebesar 94,43%. Namun, persentase realisasi anggaran Belanja langsung Tahun 2020 ini masih di bawah pencapaian realisasi tahun 2017 sebesar 99,20%. Realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	719.380.314	829.250.224	819.654.589	98,84
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	425.575.000	438.162.750	437.988.000	99,96
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	84.000.000	74.750.000	74.750.000	100
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.739.800	8.239.800	8.229.800	99,88
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.248.000	9.282.500	8.972.500	96,66
6	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	37.249.900	36.979.900	35.559.765	96,16
7	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	3.522.833.500	2.079.179.380	1.861.109.214	89,91
8	Pengelolaan Informasi, Elektronik, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya	30.539.000	54.639.000	53.440.700	97,81
9	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	567.149.000	789.273.560	777.453.108	98,50
10	Pengembangan Data/Informasi Statistik sektoral	31.494.900	31.488.300	31.488.300	100
11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.439.000	3.339.000	3.339.000	100
Jumlah		5.462.684.414	4.354.584.414	4.111.984.976	94,43

Sesuai rencana kerja program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2020, Dinas Kominfo sedianya akan melaksanakan **13 program** dan **47 kegiatan**. Setelah mengalami tahapan *refocusing* dan momen perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, hanya tersisa **9 program** dan **28 kegiatan** yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2020 ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo. Dari LKjIP ini dapat diketahui gambaran kinerja Dinas Kominfo selama tahun 2020 Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Kominfo diperoleh simpulan bahwa :

1. Pencapaian sasaran kinerja utama Dinas Kominfo pada tahun 2020, nilai IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika adalah 3,05 atau 76,24. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kominfo termasuk kategori B sehingga kinerja pelayanan Dinas Kominfo untuk tahun 2020 dapat dikatakan Baik. Jika dibandingkan pada tahun 2019 capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Banggai mengalami peningkatan sebesar 0,58 dimana pada tahun 2019 capaian IKU sebesar 75,66. Nilai konversi IKM tahun 2020 ini belum sesuai target IKU Dinas Kominfo Tahun 2020 sebagaimana ditargetkan 84,57. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Dinas Kominfo di tahun mendatang.
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran Belanja Langsung atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo pada tahun 2020 sebesar Rp.1.623.575.783 atau sebesar 97,81%. Persentase realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 ini meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan serapan anggaran Belanja Langsung pada tahun tahun 2019 yang hanya sebesar 84,56% dan tahun 2018 sebesar 94,43%.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, menunjukkan capaian kinerja terhadap sasaran Dinas Kominfo, rata-rata telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian kami menyadari bahwa, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya persiapan awal secara teknis baik survei dan identifikasi terhadap lokasi pelaksanaan kegiatan maupun kurangnya tenaga teknis / SDM yang dimiliki oleh Dinas Kominfo.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 diharapkan dapat ditingkatkan. Demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat diperbaiki dan disempurnakan pada tahun 2021. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan / kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya pemecahan masalah. Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Perlunya komitmen dan upaya yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja birokrasi Dinas Kominfo antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai secara intensif dan berkelanjutan, optimalisasi koordinasi, komunikasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
2. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
3. Tetap berpedoman pada mekanisme dan SOP pelaksanaan kegiatan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tantangan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika ke depan masih memerlukan upaya dan kerja keras Dinas Kominfo. Apalagi Dinas Kominfo ditargetkan untuk dapat merancang dan mewujudkan konsep **Kota cerdas (Smart City)** di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan kegiatan inovasi baru yang dapat ikut meningkatkan SDM aparatur Dinas Kominfo baik melalui diklat formal maupun pelatihan-pelatihan di bidang kominfo yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Dinas Kominfo dalam mewujudkan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, kiranya diharapkan apa yang menjadi target sasaran kinerja dapat tercapai untuk tahun berikutnya, dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas Kominfo. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Kominfo pada tahun mendatang. Amin



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

NAMA : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**
Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

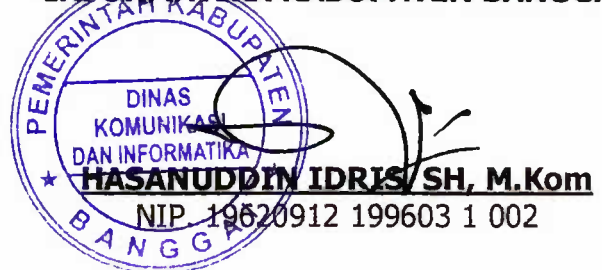
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, 15 Januari 2020

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI


Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

No.	Kinerja Utama / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	%	84,57 (Sangat Baik)

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.384.799.500
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	283.464.350
3	Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	10.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.504.500
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	79.582.000
6	Pengembangan Sistem Informasi/Data	8.811.650
7	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	2.500.000
8	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	653.239.000
9	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	33.800.000
10	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	260.854.500
11	Pengembangan Data/Informasi Statistik sektoral	77.245.000
12	Pengelolaan Informasi, Elektronik, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya	136.199.500
13	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	20.000.000
Jumlah		3.000.000.000

Luwuk, 15 Januari 2020

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI

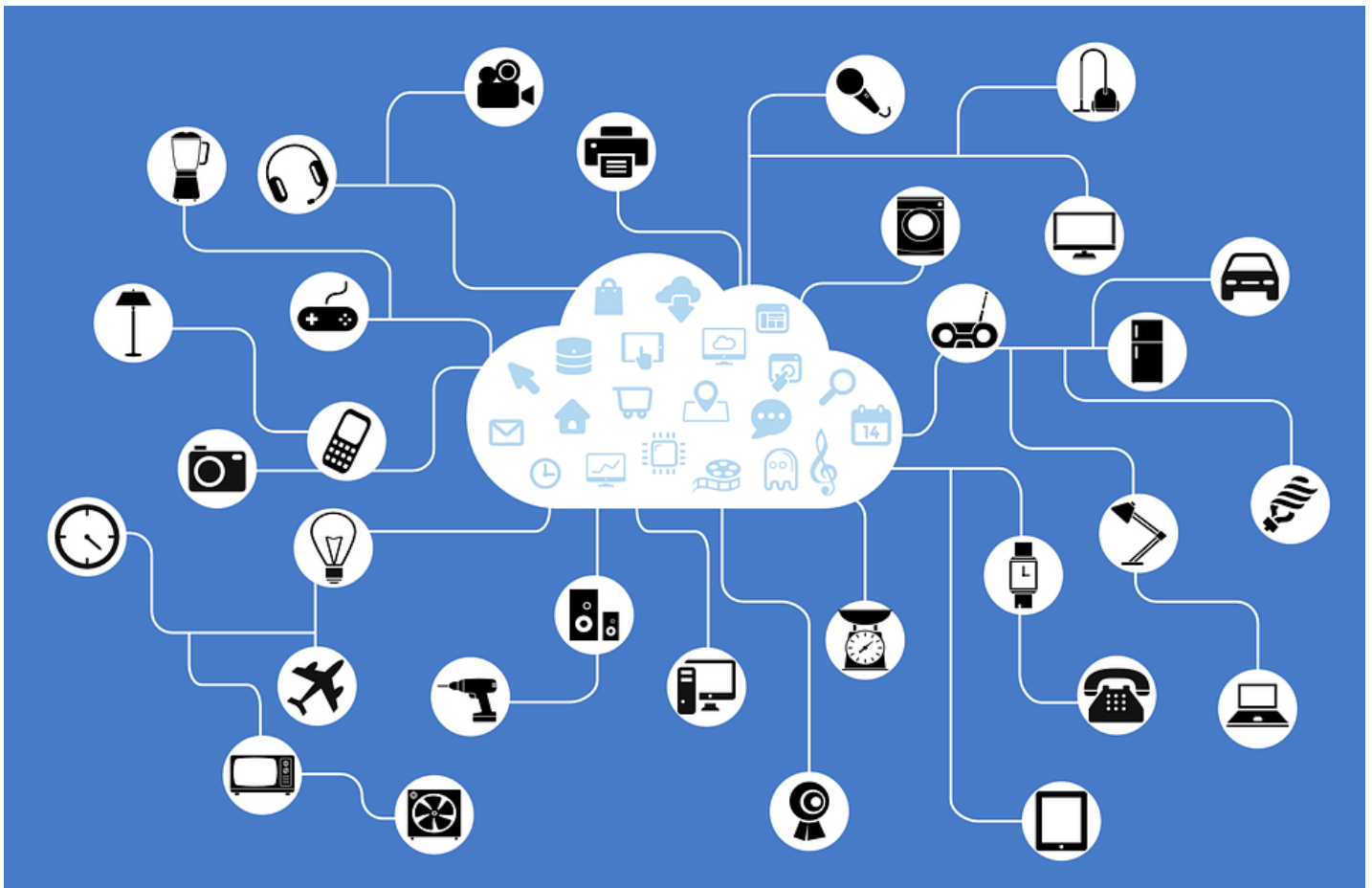
Pihak Pertama
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**


Ir. H. HERWIN YATIM, MM


HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom
NIP. 19620912 199603 1 002



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI

- Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas yaitu urusan wajib bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, pengelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan *e-government*, urusan statistik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Banggai dan urusan persandian yang meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Banggai sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika
 4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
- Misi :
1. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata (Misi IV)
 2. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) menuju pemerintahan yang berwibawa (Misi I)
- Tujuan Strategis :
1. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Banggai Smart Regency
 2. Meningkatkan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel
- Sasaran Strategis :
1. Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika
 2. Meningkatnya tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi, Formulasi Pengukuran, Sumber Data dan Penanggung Jawab)																									
1.	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Dengan melihat indeks layanan ini tentunya dapat menjadi gambaran dari persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Definisi : Layanan komunikasi dan informatika merupakan upaya dalam mengelola, menyediakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penerangan bagi masyarakat, memberikan nilai-nilai pendidikan kepada masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membangun semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Dilakukan survei responden/ publik terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 7 indikator penilaian yaitu : Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk, Penanganan Pengaduan, dan Sarana / Prasarana</p> <p>IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika = <u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u> x 100 Total Unsur yang terisi</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Layanan yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100, 00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>Penanggung Jawab : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100, 00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																								
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																								
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																								
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100, 00	A	Sangat Baik																								

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016 - 2021**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Tahun Target IKU					Keterangan
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Banggai Smart Regency	Tingkat layanan komunikasi dan informatika	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	81,00 (Sangat Baik)	84,57 (Sangat baik)	86,93 (Sangat Baik)	Kondisi awal tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih menggunakan IKU lama.